
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
TA 2023

DAFTAR ISI

3.1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN

3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	2
3.1.2. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	7
3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci	12

3.2. URUSAN STATISTIK

3.2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	16
3.2.2. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	18
3.2.3. Capaian Indikator Kinerja	23

3.3. URUSAN PERSANDIAN

3.3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	28
3.3.2. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	29
3.3.3. Capaian Indikator Kinerja	32
3.3.4. Inovasi dan Prestasi	33

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023	1
Tabel 3.2 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023	2
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	12
Tabel 3.4 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023	16
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2023.....	23
Tabel 3.6 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023	28
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2023	32
Tabel 3.8 Inovasi	34
Tabel 3.9 Prestasi.....	42

TABEL GRAFIK, GAMBAR ATAU FOTO

Grafik 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat.....	7
Grafik 2 Pembangunan Jaringan FO tahun 2021 sd 2023	10
Gambar 3 Pembangunan Jaringan FO Tahun 2023.....	10
Gambar 4 Jaringan Fiber Optik Pemerintah Kabupaten Blitar	11
Grafik 5 Analisis Stunting.....	20
Gambar 6 : Rekapitulasi Kegiatan Statistik Sektor Perangkat Daerah Tahun 2023	22
Gambar 7 Penghargaan Anindita Wistara Data	24
Gambar 8 Lisensi Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.....	31

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

3.4. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN

Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melalui 4 Program dengan 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 13.010.545.101 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.573.744.828,11 (96,64%).

**Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian
yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian
Tahun Anggaran 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.354.894.051	4.126.738.809	94,76
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.481.069	72.864.000	95,27
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.411.069	47.007.000	93,25
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.070.000	25.857.000	99,18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.100.664.101	2.897.360.212	93,44
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.048.126.101	2.846.677.612	93,39
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.120.000	39.520.000	96,11
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.418.000	11.162.600	97,76
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168.450.000	165.822.801	98,44
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	168.450.000	165.822.801	98,44
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.335.922	379.768.313	99,59
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.047.69	10.040.672	99,93
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.403.062	37.158.276	99,35
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.780.000	131.771.000	99,99
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.355.169	24.417.100	96,30
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.750.000	1.554.000	88,80
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	174.827.265	99,90
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.325.590	275.577.701	94,92
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.325.590	275.577.701	94,92

6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.160.920	193.403.827	99,10
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000	387.907	77,58
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.660.920	189.015.920	99,14
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.476.449	141.941.955	99,62
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.050.000	137.827.845	99,84
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.426.449	4.114.110	92,94
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.697.511.334	2.551.303.657	94,58
8	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.697.511.334	2.551.303.657	94,58
8.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	348.774.559	332.221.557	95,25
8.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.859.698.413	1.760.067.300	94,64
8.3	Pelayanan Informasi Publik	489.038.362	459.014.800	93,86
III	Program Aplikasi Informatika	4.961.758.100	4.936.202.211	99,48
9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.100.258.000	4.098.812.159	99,96
9.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.100.258.000	4.098.812.159	99,96
10	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	861.500.100	827.805.052	96,09
10.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	80.380.000	69.416.399	86,36
10.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	463.321.59	458.060.350	98,86
10.3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	82.774.028	81.583.600	98,56
10.4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	145.628.800	130.701.303	89,75
10.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	89.395.681	88.043.400	98,49
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	870.424.016	844.956.273,11	97,07
11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	870.424.016	844.956.273,11	97,07
11.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	657.188.316	639.721.769,11	97,34
11.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	213.235.700	205.234.504	96,25
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	125.957.600	114.543.878	90,94
12	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.957.600	114.543.878	90,94

12.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	125.957.600	114.543.878	90,94
	Total	13.010.545.101	12.565.230.828,11	96,58

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiantiksan, 2023.

3.4.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.2
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tahun Anggaran 2023

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	I. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	83,59 %	85,02%	Kurangnya bahan informasi yang melibatkan Perangkat Daerah lain	Melakukan koordinasi permintaan data/informasi sesuai ketentuan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melakukan update informasi pada website Pemkab dan Website PPID
		1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKO M	86%			

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 kali	2 kali	1) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi pengelolaan Medsos antar OPD; 2) Kurangnya SDM Pengelola Medsos OPD; 3) Belum adanya standarisasi konten Medsos OPD	Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis Revitalisasi Pengelolaan Sosial Media dan Website di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar pada 7 Juli 2023
		b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	1) Order media dilakukan secara manual, belum tersystem; 2) Komunikasi dengan media belum optimal.	a) Implementasi e-purchasing katalog media dan datasheet media order; b) 8Melakukan Kegiatan Media Gathering pada 28 Desember 2023
		c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	Badan Publik (OPD, Kecamatan, Desa/ Kelurahan) belum memahami secara mendetail terkait pengelolaan PPID	Melakukan Blmtek PPID kepada Badan Publik (OPD, Kecamatan, Desa/ Kelurahan) pada tanggal 18 Juli 2023
		II Program Aplikasi Informatika	- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan	50%	100%	- Dalam perapan layanan Perangkat Daerah kurang melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika,	- Melakukan koordinasi secara berkala terkait layanan publik

No .	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			terintegrasi - Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	100%	100%	Statistik dan Persandian	
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100%	100%		
		a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	154 unit	154 Unit		
		Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	21 Kebijakan	2 Kebijakan (perpup 35 Tahun 2023 tentang Pedoman	Kesulitan dalam melakukan analisa secara menyeluruh terkait proses bisnis yang ada. Sehingga berdampak	Kebijakan-kebijakan yang termasuk dalam SK SPBE telah dibuat oleh Bagian Organisasi

No .	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Pelaksanaan Domain Manajemen SPBE dan Regulasi Situs Web)	pada kendala dalam melakukan inovasi terkait proses bisnis yang terintegrasi	
		a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	2 Unit	Pusat data Kabupaten Blitar masih pada tier 1 (<i>basic site infrastructure</i>)	Sebagian aplikasi yang critical sudah di migrasi ke Pusat Data Nasional yang mana sudah pada tier 4 (<i>fault tolerant site infrastructure</i>)
		b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	52 unit	12 unit Aplikasi (E-Reklame , Silapor Damkar, Pengawasan kearsipan, TTE, Aplikasi Pak Carik, Apeldeskel V2, Sidaksos V2, Siapnloss, Sipeken, Sigma Kecamatan Binangun, E-Traffic Dinas Perhubungan, E-Audit)	Adanya sebagian aplikasi yang dibangun tidak ada dalam perencanaan RPJMD (banyak aplikasi yang merupakan proyek perubahan)	Memberlakukan SOP Pembangunan Aplikasi
		c. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosiste	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai	1 dokumen	19 dokumen inovasi	Dokumentasi terkait inovasi kurang lengkap/ belum sesuai	Memasukkan inovasi yang ada ke dalam Program Smart City sehingga Perangkat Daerah dapat mendokument

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		m Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	dengan Masterplan Smart City				asikan kegiatan inovasi guna pemenuhan data dukung evaluasi smart city
		d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	10 dokumen kegiatan	pada sub kegiatan yang membidangi, tidak ada anggaran makan-minum	Menggunakan anggaran makan-minum dari sekretariat
		e. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	1 dokumen	Kurangnya kelengkapan dokumentasi kegiatan pendukung SPBE	Komitmen perangkat daerah pengampu SPBE untuk dapatnya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pendukung SPBE

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiantiksa Kab. Blitar, 2023

Keterangan pengisian:

- Kolom (1) : Nomor Urut
- Kolom (2) : Kebijakan (Tujuan PD pada Renstra Bab IV)
- Kolom (3) : Program^{*} , Kegiatan, dan Sub Kegiatan TA 2023
- Kolom (4) : Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- Kolom (5) : Target Kinerja Program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) TA 2023 dan Target kinerja kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan dokumen anggaran TA 2023 disertai keterangan satuan, misal: Pertumbuhan Ekonomi (%), IPM (poin), dll.

- Kolom (6) : Realisasi Kinerja Program TA 2023
- Kolom (7) : Permasalahan Program dan Kegiatan TA 2023
- Kolom (8) : Upaya Mengatasi Permasalahan

^{*)} termasuk Program Penunjang/Kesekretariatan

3.4.2. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3.4.2.1. Program Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Kinerja dari program IKP adalah Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap akses Informasi melalui survey Kepuasan Masyarakat dengan target 83,59%. Hasil Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan adalah 85,02%. Hal ini terjadi karena persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah kita asumsikan Nilai IKM terhadap pelayanan Website PPID. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh satu unsur dengan predikat Sangat Baik dan delapan unsur dengan predikat Baik. Unsur dengan nilai tertinggi adalah unsur persyaratan (U1) dengan nilai 88,69 ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut :

Grafik 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

NO.	UNSUR	NRR	NILAI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
U1	Persyaratan	3,55	88,69	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,27	81,85	B	Baik
U3	Waktu	3,45	86,31	B	Baik
U4	Tarif/Biaya	3,50	87,50	B	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,31	82,74	B	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,43	85,71	B	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,40	85,12	B	Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,21	80,36	B	Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3,48	86,90	B	Baik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		3,44	85,02	B	Baik

Sumber: Data survei diolah, 2023



Survey IKM dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada tahun 2023 tersebut menasar 7 layanan terdiri dari

- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada semester I bernilai 81,74 dan pada semester II bernilai 82,04;
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Call Center 112 pada semester I bernilai 86,56 dan pada semester II bernilai 86,62
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan SPAN LAPOR pada semester I bernilai 78,30 dan pada semester II bernilai 76,94
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan website PPID Kabupaten Blitar pada semester I bernilai 83,92 dan pada semester II bernilai 84,02
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Non Sosial Media pada semester I bernilai 81,58 dan pada semester II bernilai 81,23
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Sosial Media pada semester I bernilai 84,87 dan pada semester II bernilai 85,36
- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Radio Persada pada semester I bernilai 82,78 dan pada semester II bernilai 82,27

Melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terus mengupayakan untuk peningkatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi terkait program dan kegiatan maupun capaian hasil-hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar.

- 1) Konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) telah didiseminasikan sesuai strategi komunikasi melalui Sosial Media (Instagram, Facebook, Twitter, Website dan Youtube), dan media partner meliputi media online, media cetak, radio dan televisi;
- 2) Nilai IKM terhadap pelayanan Website PPID Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai IKM Website PPID sebesar 78,67, meningkat 4,37 poin pada tahun 2021, meningkat 0,55 poin pada tahun 2022, kembali meningkat 0,33 poin pada semester I tahun 2023 dan meningkat 1,10 poin pada semester II tahun 2023 menjadi sebesar 85,02 masuk ke dalam mutu pelayanan B atau Baik;
- 3) Layanan Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 telah tersedia pada portal ppid.blitarkab.go.id, transparansi.blitarkab.go.id, dan ringkasan apbd.blitarkab.go.id;

- 4) Mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah terdiri dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Relawan TIK, dan Media Partner.

3.4.2.2. Program Aplikasi Informatika

Target kinerja Program Aplikasi Informatika adalah persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TIK sebanyak 100% sesuai target. Dengan rincian :

- Perangkat Daerah : 40 dinas/badan/bagian
- Layanan Perangkat Daerah : 31
- Kecamatan : 22 kecamatan
- Kelurahan : 28 kelurahan
- Fasilitas umum dan Sosial : 23 titik
- CCTV : 10 titik

Kendala layanan internet perangkat daerah yang terjadi selama kurun waktu tahun 2023 adalah terjadi putusnya jaringan kabel fiber optik karena terkena orang yang sedang menebang ranting atau pohon, karena semua kabel fiber optik lewat saluran udara, akan tetapi hal ini dapat segera ditangani cepat karena secara fisik kabel kelihatan dan mudah untuk perbaikan kembali. Secara keseluruhan untuk perangkat daerah akses internet telah diberikan layanan dengan kondisi baik sebesar 100%.

Dari keseluruhan perangkat daerah yang terlayani dengan kondisi baik adalah 154 titik sambungan (100%) dan yang terlayani dengan kondisi kurang baik 0 (0%). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada perangkat daerah baik di OPD maupun di wilayah adalah melakukan monitoring secara rutin jaringan terintegrasi dan melakukan assesment terhadap jaringan di masing-masing OPD agar tahu kelemahan/kekurangan jaringan internal OPD.

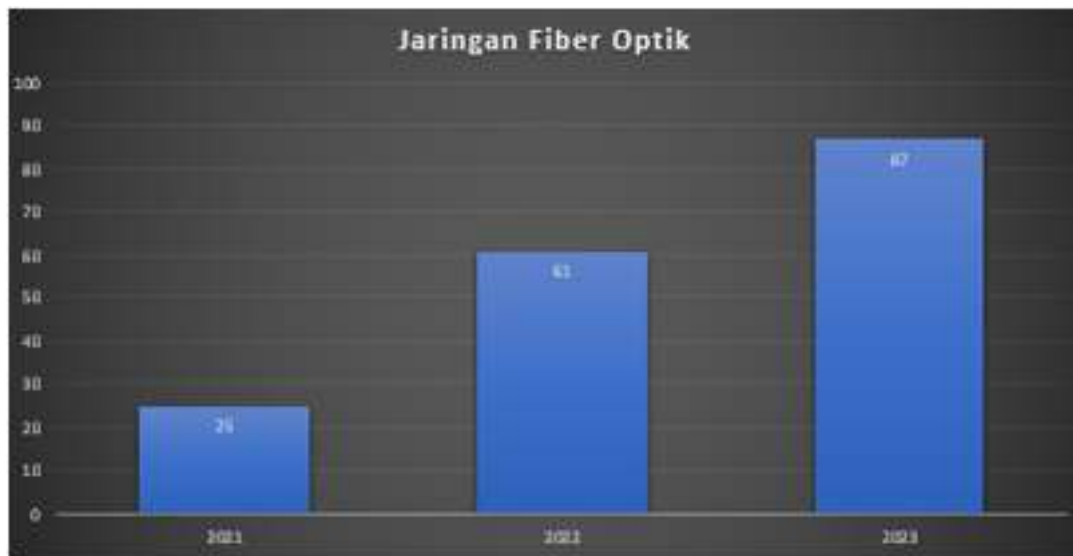
Untuk koneksi nya melalui beberapa koneksi yaitu menggunakan kabel fiber optic sebanyak 99 titik koneksi dan melalui internet broadband yaitu untuk titik yang tidak terlewati oleh jaringan fiber optic sebanyak 55 titik akses.

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik

Pembangunan Infrastruktur jaringan fiber optic (FO) dimulai tahun 2021 sepanjang 25 km, tahun 2022 sepanjang 36 km dan tahun 2023 sepanjang 26 km. Jadi total jaringan kabel Fiber Optik saat ini sepanjang 87 km,

semuanya menggunakan jaringan udara dengan memanfaatkan tiang PJU dan beberapa mendirikan tiang sendiri. Data infrastruktur FO dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2 Pembangunan Jaringan FO tahun 2021 sd 2023



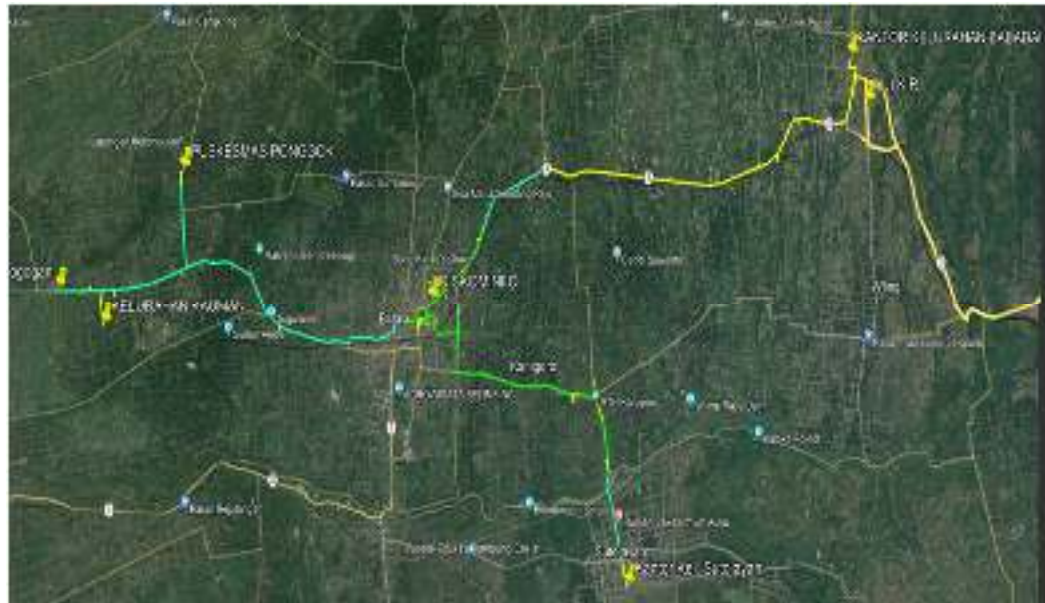
Tahun 2023 membangun jaringan Fiber Optik sepanjang 26 km menghubungkan OPD ke arah wilayah Wlingi dan sebagian wilayah Sutojayan

Gambar 3 Pembangunan Jaringan FO Tahun 2023



Secara utuh jaringan FO sepanjang 87 km membentang mulai dari sisi timur yaitu UPT Dinas Perhubungan hingga ke barat sampai dengan Kecamatan Srengat. Dari sisi utara Kecamatan Ponggok sampai dengan sisi selatan kecamatan Sutojayan.

Gambar 4 Jaringan Fiber Optik Pemerintah Kabupaten Blitar



Pada Program Aplikasi informatika, untuk persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah 50%, sedangkan realisasinya 100% yaitu melalui layanan publik pada website Perangkat Daerah yang diselenggarakan secara online. Untuk target Regulasi/Kebijakan TIK terkait implementasi e-government yaitu 21 kebijakan, sedangkan realisasinya 2 kebijakan yaitu perbup 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Domain Manajemen SPBE dan Regulasi Situs Web. Kebijakan-kebijakan terkait SPBE pada tahun 2023 dibuat oleh Bagian Organisasi.

Pada sub kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah, Pusat Data yang dikelola yaitu sebanyak 2 (Pusat Data Kabupaten Blitar dan Pusat data Nasional). Pusat Data Kabupaten Blitar masih pada tier 1 (*basic site infrastructure*) yang tidak memiliki sistem *redundancy* sehingga rentan terhadap *downtime* saat terdapat masalah pada perangkat. Untuk aplikasi yang bersifat *critical* sudah diimigrasikan ke Pusat data Nasional yang mana sudah pada tier 4 (*fault tolerant site infrastructure*).

Pada tahun 2023 telah dibangun dan dikembangkan sebanyak 12 aplikasi yaitu E-Reklame, Silapor Damkar, Pengawasan kearsipan, TTE, Aplikasi Pak Carik, Apeldeskel V2, Sidaksos V2, Siapnloss, Sipeken, Sigma Kecamatan Binangun, E-Traffik Dinas Perhubungan, E-Audit. Permasalahannya yaitu sebagian aplikasi yang dibangun tidak ada dalam

perencanaan RPJMD (banyak aplikasi yang merupakan proyek perubahan) sehingga perlu untuk memberlakukan SOP Pembangunan Aplikasi. Pada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK, terdapat 10 kegiatan yang telah dilaksanakan. Permasalahannya yaitu untuk anggaran makan dan minum tidak ada pada sub kegiatan yang membidangi, sehingga menggunakan anggaran makan dan minum pada sekretariat.

3.4.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	100	100%	100%	100%
2	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	57	70%	70%	100%
3	Persentase layanan administrasi Pemerintah (G2G) yang di implementasikan	Persen	78	74%	100%	100%
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	Persen	45	75%	75%	0,01%
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	Persen	100	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	156	233	450	184
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Orang	477	537	3000	5060
8	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	Persen	100	8528	100	100
9	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	84,22	84,73	83,59%	85,02
10	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008	Persen	100	65	97%	97
11	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi	Persen	100	0	60%	60

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
	informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah					

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiantiksan Kabupaten Blitar, 2023.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Blitar telah terpilih menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam gerakan menuju 100 smart city oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Smart City merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Program Quick Win Smart City tahun 2023 Kabupaten Blitar, yaitu :

1. Smart Governance,
 - E-Siap
 - Jaran Ijo
 - Lapak Maini
 - Lapak Sarah
2. Smart Living,
 - Abilowo
 - Idaman
 - WINGS
3. Smart Economy,
 - Berdasi
 - Wiranita
 - Link K-UMKM
4. Smart Society,
 - Selantang
 - Blitar Siap 112
 - Literasi Digital
5. Smart Branding,
 - City Branding “Land of Kings”
 - Festival Kresnayana
 - Cakrapalah
6. Smart Environment,
 - Getar Kasih
 - Si Bank Sam

- Balistik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, salah satunya dengan melakukan penguatan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 2,14 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9, atau lebih tinggi dibanding rata-rata Nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,18. Adapun pada tahun 2020 berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/386/M.KT.03/2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2020, Kabupaten Blitar tidak termasuk di dalam 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil sebagai sampling evaluasi SPBE. Pada Tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Blitar turun menjadi 2,76 karena terdapat penambahan indikator menjadi 47 indikator. Dan pada Tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Blitar sebesar 2,61. Sedangkan pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh Indeks SPBE sebesar 3,63. Rendahnya persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital senilai 0,01% (Jumlah UPT sebanyak 718 unit, jumlah UMKM sebanyak 34.764 unit sedangkan UPT dan UMKM yang sudah terfasilitasi hanya 424 unit) dikarenakan belum tersedianya anggaran yang memadai untuk fasilitasi kegiatan adopsi teknologi digital bagi UPT dan UMKM serta belum optimalnya sinergi antar semua stakeholder yang terkait.

Pada tahun 2023, sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) kota dan kabupaten telah memulai pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan kota cerdas yang didasarkan pada Masterplan Kota Cerdas (Smart City) yang telah disusun, Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari kabupaten yang terlibat dalam penilaian kota cerdas dengan perolehan nilai 3,29 untuk tahun 2023. Hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan 6 (enam) dimensi: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Pembangunan kota cerdas merupakan

kolaborasi bersama dengan para stakeholder terkait baik dari perangkat daerah, masyarakat dan pihak lainnya.

3.5. URUSAN STATISTIK

3.5.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.4
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Tahun Anggaran 2023

No .	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	Dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah belum merujuk pada data/statistik yang dihasilkan sesuai tahapan SDI	Mengoptimalkan portal data sebagai media pengumpulan dan diseminasi data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan	52 OPD	54 OPD	Terdapat kekurangan tepatan dalam penghitungan OPD pada dokrenda (RKPD 2023 maupun perubahannya)	
		a. Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	5 dokumen	5 dokumen	Daftar data yang dimiliki oleh produsen	Menghimpun daftar data pada portal data

No .	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			data masih tersimpan pada perangkat masing-masing	kabupaten Blitar sehingga dapat dibagipakaikan (interopabilitas) antar perangkat daerah dan stakeholder terkait
		b. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen	1 dokumen	Masih minimnya pemahaman pengetahuan produsen data terhadap metadata indikator sektoral sesuai peraturan yang berlaku	Mengintensifkan pendampingan pembinaan terhadap produsen data baik melalui forum data, desk data dan koordinasi teknis

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Blitar, 2023

Keterangan pengisian:

Kolom (1) : Nomor Urut

Kolom (2) : Kebijakan (Tujuan PD pada Renstra Bab IV)

Kolom (3) : Program*) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan TA 2023

Kolom (4) : Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kolom (5) : Target Kinerja Program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) TA 2023 dan Target kinerja kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan dokumen anggaran TA 2023 disertai keterangan satuan, misal: Pertumbuhan Ekonomi (%), IPM (poin), dll.

Kolom (6) : Realisasi Kinerja Program TA 2023

Kolom (7) : Permasalahan Program dan Kegiatan TA 2023

Kolom (8) : Upaya Mengatasi Permasalahan

*) termasuk Program Penunjang/Kesekretariatan

3.5.2. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah” sebesar 100% atau realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/Kota. Dalam kegiatan tersebut terdapat 2 sub kegiatan yaitu, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

a). Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Dalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, telah menghasilkan beberapa kajian baik terkait penghitungan indikator kinerja daerah ataupun analisis dan diseminasi lain diantaranya :

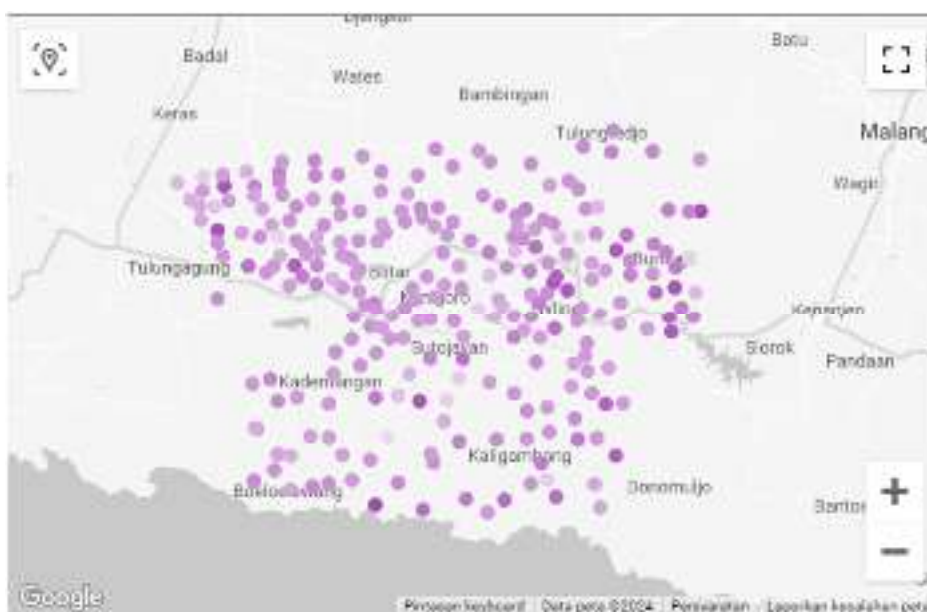
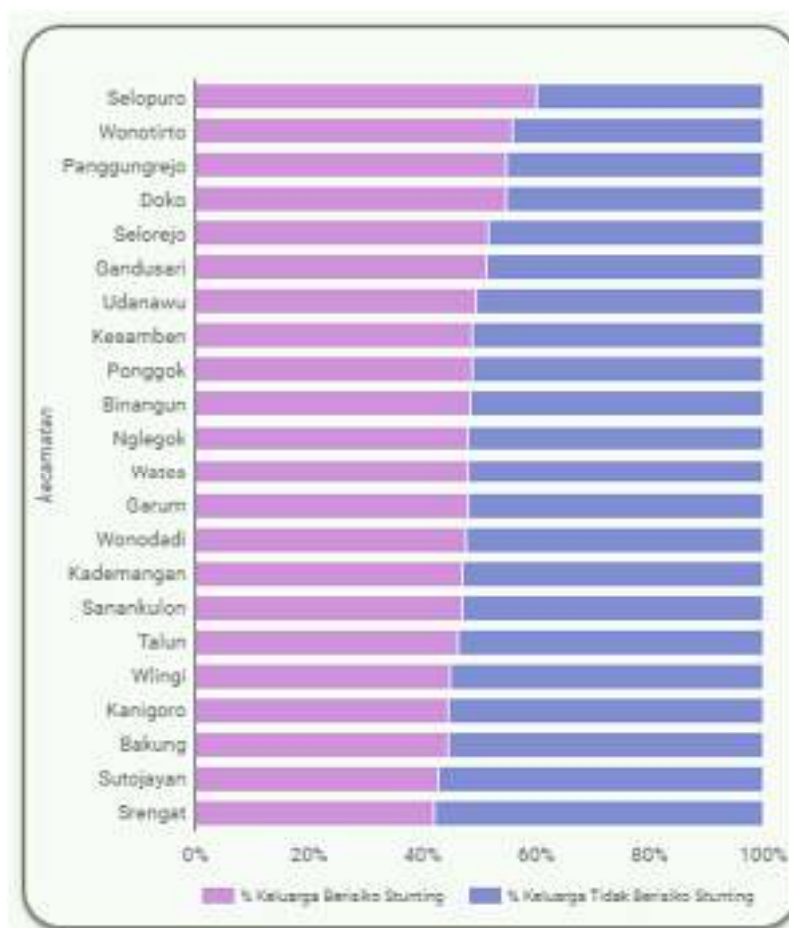
1. ICOR (*Incremental Capital Output Rasio*). Nilai ICOR di Kabupaten Blitar 2022 yang dihitung pada tahun 2023 sebesar 5,30. Jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang menyentuh angka 9,17. Nilai ICOR ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 persen diperlukan tambahan modal sebesar 5,30 persen. Semakin tinggi nilai ICOR akan berdampak pada kurang kondusifnya investasi di suatu wilayah. Dalam artian, calon investor akan melihat nilai ICOR yang kecil sebagai sebuah keuntungan dalam berinvestasi. Rata-rata nilai ICOR pada tahun 2017 hingga 2022 yang mempunyai nilai paling kecil adalah sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini juga didukung dengan pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2022 paling besar dibandingkan sektor lainnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas logistic.
2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Blitar pada 2023 mendapat skor 74,56. Skor tersebut menunjukkan sedikit penurunan dari tahun lalu, atau sebesar 0,82 poin dari 75,39 pada 2022. Meski skor IKLI pada 2023 ini menurun, namun terdapat tren kenaikan dari pertama kali survei mengenai kepuasan Masyarakat pada Layanan Infrastruktur ini dilaksanakan. Sejak 2021, terdapat kenaikan skor IKLI dari 70,38 menjadi 74,56 pada tahun ini. Artinya, perolehan IKLI hingga tahun 2023 ini menunjukkan kenaikan sebesar 5,9 persen atau 4,18 poin sejak 2021.
3. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebesar 84,23 berada pada kategori sangat tinggi, mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen dari tahun sebelumnya. Dari empat dimensi penyusun IKS, hanya Dimensi Ketertiban Umum yang

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Dimensi Ketertiban Umum juga menjadi penyumbang nilai terkecil di tahun ini.

4. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai IKM pada semester I tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,36 poin menjadi 81,74 dan pada semester II kembali mengalami kenaikan sebesar 0,30 poin atau sebesar 82,04 dengan mutu pelayanan B atau Baik. Terdapat sepuluh layanan yang dinilai, diantaranya Call Center 112, SPAN Laporan, Layanan TTE, Portal Onedata, Aplikasi Pemda/Kominfo, Jaringan Internet, Website PPID, Non Sosmed, Sosmed, dan Radio.
5. Analisis Stunting. Pada tahun 2023, dilakukan analisis sektoral dengan mengambil tema stunting. Hal ini dilatarbelakangi oleh belum adanya *profiling* stunting yang dapat menjadi dasar untuk menentukan *treatment* sesuai dengan *determinant factor* yang mempengaruhi kejadian stunting di Kabupaten Blitar sejak ditetapkannya Kabupaten Blitar menjadi lokus stunting pada tahun 2021 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Analisis yang dilakukan dengan terbatasnya waktu yang ada memiliki banyak tantangan dikarenakan kondisi data di Kabupaten Blitar terkait angka stunting *by name by address* yang dikelola oleh perangkat daerah pengampu selaku produsen data beserta *variable* yang melekat belum tersedia secara cukup. Hal ini pada akhirnya selaras dengan temuan dari analisis terkait problematika tata Kelola data stunting yang dilakukan pada program kolaborasi *Matching Fund* yang selanjutnya dibahas pada sub bab lain pada laporan ini.

Berdasarkan eksplorasi persentase keluarga berisiko stunting (KRS) di Kab Blitar ditemukan bahwa Kecamatan Selopuro (60%), Wonotirto (55.7%), Panggungrejo (54.8%), dan Doko (54.8%) perlu menjadi fokus utama di Kab Blitar. Sementara itu, ditemukan juga bahwa Kecamatan dengan persentase keluarga tidak berisiko stunting di Kab Blitar yaitu Srengat (57.8%), Sutojayan (57.4%), Bakung (55.6%), Kanigoro (55.4%), dan Wlingi (55.2%).

Grafik 5 Analisis Stunting



Sumber: Analisis Stunting Kabupaten Blitar (2023)

Selain data KRS, dalam analisis stunting dilakukan komparasi data KRS terhadap data prevalensi stunting yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena data prevalensi stunting tidak memiliki kode referensi data kependudukan (NIK) yang valid. Hal ini disebabkan pada saat pendataan penimbangan bayi masih menggunakan

data kependudukan *dummy*. Permasalahan data ini menjadi hal krusial dalam penanganan permasalahan stunting di Kabupaten Blitar sehingga perlu transformasi digital dan perubahan *business proses* yang efektif dan efisien, salah satunya adalah perwujudan Satu Data Kabupaten Blitar.

Dalam era transformasi digital dan kebutuhan akan informasi yang cepat dan mudah diakses, penyelenggaraan Satu Data menjadi hal yang sangat urgent untuk diwujudkan. Pada awal tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiantiksan melakukan *renewing* dan *updating* Portal Satu Data Kabupaten Blitar sebagai solusi terpusat untuk mengelola dan menyajikan data. Portal ini bertujuan untuk memberikan akses yang mudah, transparan, dan efektif dalam pengelolaan data pemerintah.

Renewing yang dimaksud adalah pembaruan *interface* / antar muka system, core system yang mencakup pengembangan sub indicator, tipe value data, raw data, membuat formula nilai indicator dari komposit sub indicator, user walidata pendukung, registrasi dan verifikasi user, integrasi SIPD e-walidata dan SI LPPD, integrasi metadata dan publikasi hasil kegiatan statistik. Sementara, updating dimaksudkan untuk menyesuaikan indicator kinerja daerah yang berasal dari RPJMD, LPPD, SPM dan data sectoral dari hasil perencanaan data.

Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber pada Portal Satu Data, memungkinkan pemerintah dan masyarakat umum untuk mengakses data yang dibutuhkan tanpa harus mencari di berbagai platform. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah, memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih baik keputusan yang diambil berdasarkan data yang tersedia.

Selain memberikan kemudahan akses, Portal Satu Data juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan menghemat sumber daya dengan mengurangi redundansi dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Integrasi data dari berbagai *stakeholder* yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan merangsang inovasi dalam pelayanan publik.

b). Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor

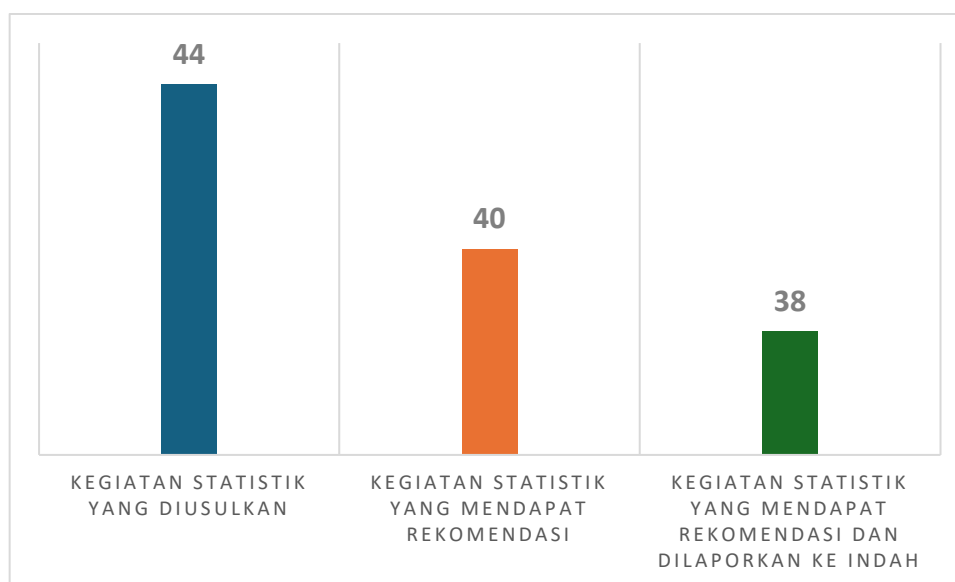
Pada sub kegiatan ini, dilakukan penghimpunan metadata statistik sektoral atas daftar data yang disepakati. Daftar data tersebut dihasilkan melalui desk yang diselenggarakan bersama Bappedalitbang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiantiksan, serta Perangkat Daerah terkait. Dari 31 Perangkat Daerah dan 10 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah menghasilkan 1108 indikator dan telah dilengkapi metadata statistic sebesar 64,67 persen yang memenuhi

standart data sesuai dengan Peraturan kepala BPS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Data Yang Meliputi Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran dan Satuan.

Disamping itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengusulkan 44 rancangan Kegiatan Statistik ke Badan Pusat Statistik (BPS) melalui aplikasi Romantik BPS. Terdapat dua jenis kegiatan statistik yaitu Survei dan Kompilasi Produk Administrasi (kompromin). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPS, terdapat 40 rancangan Kegiatan Statistik yang mendapat Rekomendasi. Rancangan kegiatan tersebut terdiri dari 21 Kegiatan Statistik Survei dan 19 Kegiatan Statistik Kompromin. Terdapat 4 kegiatan statistik yang tidak mendapat rekomendasi karena sudah pernah diajukan sebelumnya.

Setelah dilakukan evaluasi, terdapat 2 survei yang tidak berjalan yaitu Pencacahan Lengkap Updating Toko Swalayan Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Peningkatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pendataan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Blitar Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja. Kegiatan statistik yang telah berjalan dan mendapatkan rekomendasi dilaporkan ke portal Indonesia Data Hub (INDAH) BPS yang terdiri dari Metadata Statistik (MS) Kegiatan, Variabel dan Indikator.

Gambar 6 : Rekapitulasi Kegiatan Statistik Sektoral Perangkat Daerah Tahun 2023



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar diolah 2023

Selain data statistik sektoral, berdasar Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia terdapat pula data spasial. Kebutuhan data dan informasi geospasial oleh berbagai sektor semakin meningkat seiring kemudahan dan kecepatan teknologi berbasis spasial. Informasi geospasial menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah mengingat perencanaan berbasis spasial lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian telah berhasil melakukan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Blitar dan Kepala BIG pada 20 Juli 2023 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Blitar dengan jangka waktu 5 tahun.

Selanjutnya, atas geoportal yang telah dibangun pada akhir tahun 2022 yang lalu, telah diintegrasikan dengan Sistem Katalog Metadata Berbasis Informasi Geospasial (SiKaMBInG) menggunakan *Application Programming Interface (API)*. SiKamBING merupakan sistem yang dibangun oleh BIG yang bertujuan untuk menjembatani geoportal selain PALAPA yang dikembangkan oleh Kementerian-Lembaga-Daerah (K/L/D) sendiri yang berbasis *geo node*. Dengan adanya SiKamBING, seluruh data vektor maupun raster yang telah diupload di geoportal akan di-*harvest* di Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Melalui geoportal yang telah dibangun, kerjasama yang telah disepakati dengan BIG serta intensifikasi forum data geospasial yang harus dilakukan pada 2024, diharapkan kebijakan satu peta (KSP) Kabupaten Blitar dapat terwujud, selanjutnya pengambilan kebijakan kedepan dapat lebih terukur dan tepat sasaran dengan data berbasis spasial

3.5.3. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100%	100%	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100%	100%	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, 2023

Prestasi : Anindhita Wistara Data

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. EPSS bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Komponen penyusun dalam instrumen EPSS ini terdiri dari 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator serta menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Indeks Domain, dan Indeks Aspek. Pada Senin, 04 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan Penghargaan Anindita Wistara Data bertempat di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Sudirman, Jakarta atas EPSS yang dilakukan pertama kali di tahun 2023 dengan hasil IPS 2,72 atau berkategori baik. Secara detail, nilai tiap domain adalah Prinsip Satu Data Indonesia (3.00), Kualitas Data (2.24), Proses Bisnis Statistik (3.00), Kelembagaan (2.59), Statistik Nasional (2.78)

Gambar 7 Penghargaan Anindita Wistara Data



Inovasi : Integrasi SIPD e-walidata dengan portal sdi kab. Blitar

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Blitar, dilakukan integrasi antara Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) e-walidata dengan portal data kabupaten. Proses ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan integrasi, termasuk identifikasi data yang relevan dan penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Setelah itu, dilakukan penyesuaian data untuk memastikan bahwa format dari SIPD e-walidata sesuai dengan struktur data yang diperlukan oleh portal data Kabupaten Blitar. Pengembangan API menjadi jembatan komunikasi antara kedua sistem tersebut. Endpoint API, metode autentikasi, dan format data diatur dengan cermat untuk memastikan keterhubungan yang lancar. Fitur ini telah disediakan pada API di SIPD E-Walidata

Dengan integrasi yang dilakukan maka proses pertukaran data dilakukan lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada proses manual, mengoptimalkan alur kerja, dan menghindari duplikasi data. Keberadaan portal data Kabupaten Blitar sebagai sumber informasi terbuka memperkuat transparansi pemerintahan, memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk dengan mudah mengakses data pemerintah. Integrasi SIPD e-walidata dengan portal data Kabupaten Blitar selanjutnya menjadi pondasi yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

Dengan adanya integrasi ini, maka operator data dapat mengisi SIPD E-Walidata melalui portal data Kabupaten Blitar dan data yang telah diisi akan secara real time terintegrasi dengan system SIPD E-Walidata. Pemerintah Kabupaten Blitar akan memiliki data yang sama dengan SIPD E-Walidata sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan ke depan dengan disandingkan data sectoral lainnya di portal data seperti indikator pada RPJMD, LPPD, SPM, dan indicator lainnya.

Pelaksanaan Program Matching Fund 2023: Penerapan Model Sistem Tata Kelola Data Spasial Reformasi Birokrasi Tematik Menuju Satu Data Pemerintah Kabupaten Blitar

Pemerintah Kabupaten Blitar menghadapi tantangan dalam optimalisasi kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dengan data kinerja yang belum terolah dan terintegrasi secara efisien. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 3 Tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditugaskan sebagai leading sector bersama dengan Bappedalitbang dan BPS Kabupaten Blitar dalam membangun basis Satu Data Kabupaten Blitar, khususnya terkait data kinerja RB Tematik. Memahami urgensi ini, Pemerintah Kabupaten Blitar telah memprioritaskan RB tematik sebagai kinerja utama.

Solusi inovatif yang telah dilaksanakan adalah bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan melaksanakan kegiatan *Matching Fund* dengan tema Penerapan Model Sistem Tata Kelola Data Spasial Reformasi Birokrasi Tematik. Model ini tidak hanya menyajikan informasi secara spasial dan komprehensif, tetapi juga mengurangi kegiatan input data berulang, meningkatkan efektivitas tim SDM, dan meningkatkan kualitas luaran informasi untuk mendukung kebijakan RB tematik. Kegiatan penerapan model ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid, utuh, dan spesifik terkait fokus dasar permasalahan RB tematik, dalam hal ini tematik stunting yang menjadi *pilot project*. Prevalensi Stunting menjadi indikator mendasar dalam penanganan stunting di Indonesia. Ketepatan (tervalidasi) dan kelengkapan data, menjadi syarat penting dalam menilai ketetapan/efektifitas intervensi kebijakan terhadap adanya stunting.

Hasil evaluasi kegiatan *Matching Fund* (MF) Tahun 2023 di Kabupaten Blitar, menunjukkan bahwa keberadaan data prevalensi stunting masih sangat rendah validitas dan kelengkapannya sebagai basis bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian, pencegahan dan penanganan stunting di daerah. Kelemahan tersebut, terjadi pada beberapa titik kritis (*critical process*) di dalam mekanisme dan prosedur pengumpulan data. Kelemahan validitas data tercakup minimal ada 7 indikator, yaitu: 1) Jenis dan sumber data bagaimana; 2) mekanisme dan prosedur perolehan data; 3) struktur organisasi pengumpulan dan pengelola data; 4) sistem verifikasi dan validasi data; 5) metode dan teknik validasi data; 6) kualifikasi SDM pelaksana dan 7) sistem teknologi informasi digunakan. Kelemahan sistem validitas data ini tentu akan berdampak terhadap ketepatan kebijakan dalam penanganan stunting. Dari evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dihasilkan output berupa:

- 1) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati terkait Sistem Tata Kelola Data dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blitar

Terdapat dua Keputusan Bupati Blitar yang mengatur kelembagaan penanganan stunting. Pertama, Nomor : 188/118/406/ KPTS/2022 tentang Tim Pendamping Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blitar. SK ini membentuk kader desa di setiap dusun yang terdiri dari Kader PKK, Bidan, dan Petugas KB. Tim ini menegaskan bahwa TPK berfungsi mendampingi keluarga keluar dari stunting. Kedua, Nomor 188/82/409.1.2/KPTS/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Daerah.

Akan tetapi, peraturan ini hanya merupakan kebijakan pembentukan tim pelaksana percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini belum mencakup tata kelola data stunting yang sangat penting dan urgen bagi kebijakan. Kebijakan tata kelola data stunting dimulai dari pendataan awal di posyandu oleh petugas, struktur

organisasi pengelola data, mekanisme dan prosedur pendataan dan pengelolaan data, sistem verifikasi dan validasi data, sampai dengan pemanfaatan data oleh berbagai dinas terkait. Semua proses ini belum diatur di dalam kebijakan bupati Kabupaten Blitar. Hal ini jelas berdampak terhadap validitas dan kualitas data prevalensi stunting yang dihasilkan dan akhirnya berdampak pada kebijakan penanganan yang tidak efektif dan optimal.

Validitas data menjadi titik kritis (critical point) yang sangat penting dan urgen dalam perumusan kebijakan penanganan stunting. Data yang kurang valid dan tidak lengkap, tentu akan berdampak terhadap kualitas dan efektifitas kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka, sangat penting untuk mengusulkan adanya peraturan Bupati tentang sistem manajemen data prevalensi stunting yang memuat sistem tata kelola data stunting Peraturan Bupati ini menjadi dasar bagi Pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mengelola stunting bagi kebijakan.

2) SOP Pengumpulan dan Validasi Data,

SOP ini digunakan untuk seluruh petugas pengumpul dan validasi data termasuk didalamnya petugas posyandu, bidan desa, petugas gizi, operator daerah, dan operator nasional. Data yang diikumpulkan adalah data balita dan data primer lainnya tentang keluarga balita.

3.6. URUSAN PERSANDIAN

3.6.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.6
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Tahun Anggaran 2023

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang ter integrasi	IV. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	100%	Pembangunan aplikasi OPD belum dilakukan Pentest	Perlu melakukan Pentest ke beberapa aplikasi milik OPD
		3. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	65%	100%	Belum keseluruhan eselon III keatas melakukan aktivasi TTE	Melakukan pendampingan untuk melakukan aktivasi TTE
		a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	1 laporan		

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Blitar, 2023

Keterangan pengisian:

- Kolom (1) : Nomor Urut
- Kolom (2) : Kebijakan (Tujuan PD pada Renstra Bab IV)
- Kolom (3) : Program*) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan TA 2023
- Kolom (4) : Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- Kolom (5) : Target Kinerja Program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) TA 2023 dan Target kinerja kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan dokumen anggaran TA 2023 disertai keterangan satuan, misal: Pertumbuhan Ekonomi (%), IPM (poin), dll.
- Kolom (6) : Realisasi Kinerja Program TA 2023

Kolom (7) : Permasalahan Program dan Kegiatan TA 2023

Kolom (8) : Upaya Mengatasi Permasalahan

*) termasuk Program Penunjang/Kesekretariatan

3.6.2. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023, urusan persandian selain mengampu kegiatan pengamanan berita sandi juga fokus pada pengamanan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengamanan jaringan diwujudkan dalam bentuk optimalisasi penerapan Firewall yang mengatur lalu lintas jaringan internet. Selain itu pengamanan terhadap website dan aplikasi sudah mulai digalakkan secara bertahap dengan penerapan SSL (Secure Socket Layer) yang berfungsi melakukan enkripsi informasi sensitif pada website dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal menjaga keamanan informasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 telah dibentuk CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar melalui SK Bupati Blitar Nomor : B/180.05/ 264 /409.1.2/KPTS/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar dan telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh BSSN dan dilaunching serta ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara sesuai Surat Registrasi Nomor : 244/CSIRT.01.02.01/BSSN/09/2023 pada tanggal 13 September 2023. Tim Tanggap Insiden Siber ini melibatkan seluruh perangkat daerah sebagai agen siber sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi apabila terjadi insiden pada sistem elektronik di Kabupaten Blitar. TiTIS-BlitarKab telah menerima dan menangani hingga memulihkan aduan siber sepanjang tahun 2023. Aduan siber ini dikelompokkan sebagai berikut :

1. Aduan peretasan situs web hingga defacement dan penyusupan SEO ilegal .

Aduan peretasan situs web sebanyak 49 (empat puluh sembilan) aduan dengan keberhasilan penanganan insiden siber sebanyak 49 (empat puluh sembilan). Sebagai tindak lanjut untuk mencegah peretasan situs web adalah dilakukan upaya perbaikan sistem dan menonaktifkan aplikasi/plugin

yang rentan. Adapun dalam proses penanganan insiden peretasan situs web ditemukan kendala sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Pemilik Sistem Elektronik;
- 2) Akses Sistem Elektronik yang terdampak;
- 3) Pemilik Sistem Elektronik tidak melaksanakan rekomendasi perbaikan melalui prosedur SDLC/CI/CD/Secure-Coding/Versioning;
- 4) Pemilik Sistem Elektronik tetap saja mengizinkan developer untuk mengakses Sistem Elektronik secara langsung via VPN yang secara manajemen akses Keamanan Informasi tidak diperkenankan;
- 5) Pengelola Sistem Elektronik (aplikasi) tidak membekali hardening pada VM dan container yang digunakan;
- 6) Pengelolaan CPANEL yang kurang baik dalam melakukan update sistem maupun plugin-plugin CMS yang dikelola dimana ini adalah aset yang paling banyak mengalami serangan

Sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Blitar sebagai Unit Kerja pengampu CSIRT melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menghimbau dan menggiring perangkat daerah sebagai pengguna infrastruktur TIK di kominfo untuk mau menaruh source-code ke dalam sebuah environment CI/CD sebagai saranan versioning manajemen perubahan SPBE; dan
- 2) Tetap melakukan prosedur Containment, Eradikasi dan Pemulihan pada sistem yang terjadi insiden siber;

2. Perangkat Lunak Berbahaya (Malware berupa BotNet)

Aduan siber terhadap serangan atau infeksi malware BotNet sebanyak 2 kali dengan keberhasilan penanganan malware sebanyak 2 kali juga. Peretasan ini terjadi pada Sistem Elektronik e-pada pada 29 Januari 2023 dan siridoaja pada 21 November 2023. Sebagai upaya perbaikan dan untuk mencegah agar tidak terulang insiden siber tersebut maka TiTIS-BlitarKab melakukan containment dengan menurunkan VM dari IP publik ke segmen IP intranet lalu melakukan eradikasi pada proses yang terinfeksi di sistem e-pada kemudian untuk sistem siridoaja dilakukan pe-nonaktifan VM windows yang terindikasi menjalankan lisensi bajakan.

Gambar 8 Lisensi Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia



Dalam meningkatkan keamanan informasi maka penerapan Sertifikat Elektronik juga mulai didorong untuk mendukung penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Sertifikasi Elektronik yang ditandatangani pada Desember 2019 serta penggunaan Aplikasi SRIKANDI dari ANRI di tahun 2022 menjadi titik tolak Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memulai penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Sistem Elektronik yang saat ini banyak dipakai di berbagai OPD. Saat ini penggunaan Tanda Tangan Elektronik sudah diaplikasikan oleh semua OPD di Kabupaten Blitar mulai dari eselon 2, eselon 3 hingga staf sesuai usulan dan sesuai kebutuhan OPD masing - masing. Penerapan Tanda Tangan Elektronik akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih handal, aman, efektif dan efisien. Namun demikian, untuk integrasi sistem elektronik yang telah ada dengan Tanda Tangan Elektronik dibutuhkan langkah-langkah berupa analisa kebutuhan dan uji kesesuaian yang harus diikoordinasikan dengan BSR sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Di tahun berikutnya inventarisasi aplikasi/sistem elektronik yang berpotensi diintegrasikan dengan Tanda Tangan Elektronik dan persiapan analisa kebutuhan serta persiapan persyaratan uji kesesuaian perlu direncanakan secara matang untuk mendukung penerapan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2023 telah melakukan IT Security Assessment (ITSA) secara mandiri terhadap 3 Aplikasi Pelayanan, diantaranya aplikasi e-Traffic milik Dinas Perhubungan, aplikasi Siap n Loss dan aplikasi Sidatiz milik Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

3.6.3. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian diukur melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelolaan keamanan siber untuk K/L/D	Orang	0	-	1	40
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	Orang	0	1	1	1
3	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	0	-	1	40

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar, 2023

Uraian/Narasi Pendukung:

Setelah terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber (TiTIS) Kabupaten Blitar, untuk membekali tim dan meningkatkan kapasitas SDM TiTIS, maka DiskominfoBlitar melakukan kerjasama dengan BSSN untuk melakukan Diklat Pelatihan Cyber Security Fundamental dengan peserta 40 orang dari berbagai OPD. Sehingga capain realisasi IKK menjadi 40 orang.

3.6.4. Inovasi dan Prestasi

Sebagaimana Keputusan Bupati Blitar Nomor B/ 180.05/ 264 /409.1.2/KPTS/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar telah dibentuk

CSIRT Pemerintah Kabupaten Blitar, yang memiliki layanan : reaktif, proaktif, dan layanan manajemen kualitas keamanan. Sebagai implementasi layanannya adalah inovasi LAKI CETAR (Layanan Keamanan Informasi Cyber Kabupaten Blitar) sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar melalui <https://lakicetar.blitarkab.go.id> . LAKI CETAR ini memberikan 9 produk layanan yaitu :

1. Tanggap darurat keamanan informasi
2. Assesment / Audit Keamanan Aplikasi
3. EDR (end Point Detection and Response)
4. Kontra Penginderaan (Jamming)
5. Tanda Tangan Elektronik
6. Pengajuan Sertifikat Dokumen Elektronik
7. Deteksi Pengawasan terselubung
8. Kriptografi Dokumen Elektronik
9. Assesment / Audit Keamanan Jaringan

3.6.4.1. Inovasi

Tabel 3.7 Inovasi

No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
1.	E-Siap	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Elektronik Sistem Informasi Aplikasi Pendaftaran (E-SIAP) merupakan inovasi yang dihadirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, inovasi ini dihadirkan dengan tujuan mengatasi permasalahan seperti antrian yang selalu membludak setiap harinya dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan data kependudukan yang bisa dilakukan melalui aplikasi yang diakses secara online.
2.	Jaran Ijo	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dalam rangka Percepatan Perekaman KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melaksanakan Layanan Perekaman KTP Elektronik SI JARAN IJO (Inovasi Jemput Bola Penduduk Rentan Iso Njujug Omah). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat lebih dapat dijangkau dan terbantu untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan dengan mudah dan cepat.
3.	Lapak Maini	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Instansi Lain (Lapak Maini) merupakan dukungan layanan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada oleh Puskesmas, RSUD, Dispendukcapil, dan Pengadilan yang didasarkan oleh asas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan layanan

No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
			Adminduk di Kabupaten Blitar bisa berjalan efektif, efisien dan akuntabel.
4.	Lapak Sarah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Layanan Pengajuan Adminduk Desa dan Kelurahan (Lapak Sarah) merupakan aplikasi yang dioperasikan oleh petugas registrasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen adminduk di tingkat desa/kelurahan. Layanan ini mempercepat pengurusan dokumen adminduk yang ditangani oleh petugas desa dan kelurahan sehingga masyarakat tidak perlu datang dan mengantri pelayanan di Dispendukcapil.
5.	Abilowo	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	Abilowo merupakan program pengolahan sampah rumah sakit yang dilakukan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk dijadikan penghasilan tambahan bagi masyarakat.
6.	Idaman	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	Informasi Dalam Genggaman (Idaman) merupakan aplikasi mobile yang dikembangkan untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan rumah sakit dan mengedepankan layanan rumah sakit yang pintar, kreatif dan inovatif dalam menyediakan layanan informasi medis secara cepat, tepat, dan komunikatif. Layanan yang tersedia berupa informasi pendaftaran online, jadwal poli klinik, informasi ketersediaan kamar, fasilitas rawat inap dan layanan pengaduan di mana saja dan kapan saja.

No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
7.	WINGS	RSUD Ngudi Waluyo WLing	Wlingi Emergency Medical Services (WINGS) adalah layanan penjemputan ambulans kegawatdaruratan trauma, nontrauma dan maternal di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi secara gratis selama 24 jam. Layanan ini meningkatkan kemampuan penanganan awal kasus kegawatdaruratan di luar rumah sakit dan memudahkan akses mendapatkan pertolongan kegawatdaruratan dan evakuasi di luar rumah sakit yang mencakup desa dan daerah terpencil seperti daerah pegunungan melalui ambulans gawat darurat WINGS.
8.	Berdasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Program Berdaya Saing dan Berprestasi (BERDASI) memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan potensi diri, skill up, strategi branding, pengelolaan finansial, perluasan pasar, pemanfaatan teknologi digital melalui pembinaan, bimtek, pelatihan dan monitoring bersama coach, mentor, narasumber yang handal dan berpengalaman.
9.	Wiranita	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelatihan Pengembangan Wirausaha Wanita (Wiranita) Naik Kelas merupakan upaya pengembangan usaha bagi para wanita kepala rumah tangga dan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) supaya lebih stabil dan meningkat penghasilannya. Pembinaan dalam bentuk pelatihan yang prioritas pada pengembangan

No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
			manajemen dan kapasitas SDM, produktivitas dan perluasan pemasaran, kualitas produk, dan pencatatan keuangan bersama bimbingan coach, mentor dan narasumber yang berpengalaman dan handal.
10.	Link K-UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Layanan Informasi dan Konsultasi Naik Kelas Koperasi dan Usaha Mikro (Link K-UMKM) merupakan fasilitas tindak lanjut dari program One Village One Product (OVOP) meliputi pemberian informasi, konsultasi hingga pendampingan kepada koperasi dan usaha mikro melalui media online dan tatap muka yang dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.
11.	Selantang	Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Program Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) merupakan program pendidikan non formal yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) agar menjadi lansia Tangguh yang SMART, yaitu sehat, aktif, mandiri, produktif, dan bermartabat hingga akhir hayatnya serta membentuk komunitas lansia yang solid untuk saling memotivasi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan tetap produktif.
12.	Blitar Siap 112	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Layanan 112 merupakan sistem layanan darurat menggunakan sistem nomor tunggal panggilan bebas pulsa dari semua operator dan telepon rumah bagi masyarakat yang

No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
			<p>membutuhkan kedaruratan secara cepat. Layanan panggilan kegawatdaruratan yang ditangani seperti kedaruratan medis, kebakaran, kecelakaan, keamanan dan bencana. Mekanisme layanan 112 adalah menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat, menanyakan informasi secara lengkap, lalu menindaklanjuti laporan yang masuk dan melakukan koordinasi dengan OPD dan instansi terkait.</p>
13.	Literasi Digital	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<p>Merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan literasi digital masyarakat desa dan siswa SMK se-Kabupaten Blitar. Gerakan Literasi Digital di tahun 2023 telah bekerja sama dengan Kemenkominfo, Pandu Digital, Relawan TIK dengan membimbing 5000 pelajar SMK dan masyarakat desa.</p>
14.	City Branding “Land of Kings”	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	<p>City Branding adalah strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan citra positif sebagai identitas visual yang menggambarkan kekhasan potensi, sejarah, karakteristik dan budaya masyarakat daerah. City Branding “Land of Kings” diangkat karena dalam sejarah, Kabupaten Blitar merupakan tanah para raja atau pemimpin sehingga Kabupaten Blitar memiliki keunikan yang dapat menarik wisatawan baik lokal maupun luar daerah.</p>

No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
15.	Festival Kresnayana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Festival Kresnayana ini merupakan wadah bagi para seniman untuk berkreasi dan menunjukkan bakat serta menjadi ajang memperkuat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat. Festival Kresnayana merupakan pagelaran sendratari yang mengangkat ketokohan Sri Kresna dalam membawa pesan perdamaian dunia. Kisah Kresnayana ini ada pada relief Candi Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Untuk itu Festival Kresnayana selalu digelar di Amphitheater Penataran.
16.	Cakrapalah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Cakra Palah merupakan identitas yang berisikan motif batik lokal yang sudah ada di masing-masing wilayah dan entitas budaya serta sejarah di Kabupaten Blitar. Filosofi dari motif Cakra Palah adalah Cakra berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti roda atau lingkaran. Secara keseluruhan, makna 'Cakra Palah' adalah simbol kesadaran sejati manusia akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang tidak sempurna, sehingga dalam kehidupannya harus selalu berupaya untuk mencari kesempurnaan urip sejati.
17.	Getar Kasih	Dinas Lingkungan Hidup	Gerakan Terpadu Kali Bersih (Getar Kasih) bertujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai, mewujudkan sistem kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien, serta mewujudkan



No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
			kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.
18.	Si Bank Sam	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Bank Sampah (Si Bank Sam) merupakan sebuah aplikasi yang memberikan informasi tentang pengelolaan sampah secara real time dan layanan pembukuan tabungan sampah dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah.
19.	Balistik	Dinas Lingkungan Hidup	Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik) adalah salah satu inovasi program untuk mengurangi dan mengelola sampah plastik yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
20.	Aplikasi SIGMA	Kecamatan Binangun	Aplikasi yang digunakan untuk peningkatan kinerja pengelolaan data desa-kecamatan secara sistematis dan terintegrasi di Kecamatan Binangun
21	Laki Cetar (Layanan Keamanan Informasi Cyber Kabupaten Blitar) 	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	CSIRT Pemerintah Kabupaten Blitar, yang memiliki layanan : reaktif, proaktif, dan layanan manajemen kualitas keamanan. Sebagai implementasi layanannya adalah inovasi LAKI CETAR (Layanan Keamanan Informasi Cyber Kabupaten Blitar) sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar melalui https://lakicetar.blitarkab.go.id
22	Integrasi SIPD e-walidata dengan porta SDI Kab, Blitar	Dinas Komunikasi, Informatika,	Proses ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan



No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
		Statistik dan Persandian	<p>integrasi, termasuk identifikasi data yang relevan dan penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Setelah itu, dilakukan penyesuaian data untuk memastikan bahwa format dari SIPD e-walidata sesuai dengan struktur data yang diperlukan oleh portal data Kabupaten Blitar. Pengembangan API menjadi jembatan komunikasi antara kedua sistem tersebut. Endpoint API, metode autentikasi, dan format data diatur dengan cermat untuk memastikan keterhubungan yang lancar. Dengan integrasi yang dilakukan maka proses pertukaran data dilakukan lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada proses manual, mengoptimalkan alur kerja, dan menghindari duplikasi data. Keberadaan portal data Kabupaten Blitar sebagai sumber informasi terbuka memperkuat transparansi pemerintahan, memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk dengan mudah mengakses data pemerintah. Integrasi SIPD e-walidata dengan portal data Kabupaten Blitar selanjutnya menjadi pondasi yang signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel</p>

No	Judul Inovasi	PD/Unit inisiator	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress/dampak)
			mulai dari perencanaan hingga penganggaran

3.6.4.2. Prestasi

Tabel 3.8 Prestasi

No	Peringkat, Kategori, dan Jenis Penghargaan	Skala	Peraih	Pemberi Penghargaan	Sumber Data	Keterangan
1	Penghargaan Mitra Kolaboratif Terbaik dalam festiva TIK 2023 di Semarang	Nasional	Pemerintah Kabupaten Blitar	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Instagram Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar	Penghargaan Mitra Kolaboratif Terbaik dalam festiva TIK 2023 di Semarang pada tanggal 27-28 Oktober 2023 
2	Penghargaan Instansi Terbaik Pertama dalam Instansi Teraktif dalam Pendaftaran PSE Lingkungan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023	Nasional	Pemerintah Kabupaten Blitar	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Instagram Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar	Penghargaan Instansi Terbaik Pertama dalam Instansi Teraktif dalam Pendaftaran PSE Lingkungan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 pada tanggal 16-19 Oktober 2023 

No	Peringkat, Kategori, dan Jenis Penghargaan	Skala	Peraih	Pemberi Penghargaan	Sumber Data	Keterangan
						
3	PPID Terbaik Kabupaten/Kota Kategori Menuju Informatif dari Komisi Informasi Jawa Timur	Regional Provinsi Jawa Timur	PPID Kabupaten Blitar	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur		Merupakan bentuk pengakuan Komisi Informasi Jawa Timur atas kinerja PPID Kabupaten Blitar dan implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan diserahkan pada 5 Desember 2023.
4	PPID Desa Terbaik Kategori Informatif dan Penyedia Informasi Terbaik dari Komisi Informasi Jawa Timur	Regional Provinsi Jawa Timur	PPID Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur		Merupakan bentuk pengakuan Komisi Informasi Jawa Timur atas kinerja PPID Desa Popoh binaan PPID Kabupaten Blitar dan implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan diserahkan pada 5 Desember 2023.
5	Penghargaan Anindhita Wistara Data	Nasional	Pemerintah Kabupaten Blitar	BPS Pusat	Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022	Merupakan bentuk apresiasi BPS terhadap komitmen dan capaian K/L/Pemda dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Blitar 

PENUTUP

Secara Umum kinerja OPD berjalan dengan sangat baik dan memuaskan. Terbukti dengan peningkatan indeks SPBE yang cukup tinggi. Berkat usaha dan doa yang tiada henti akhirnya Indeks SPBE naik dengan drastis. Dimana Indeks SPBE tahun 2022 sebesar 2,61 sedangkan di tahun 2023 Indeks SPBE naik menjadi 3,63. Artinya kenaikannya cukup signifikan yaitu sebesar 1,02 hal ini tidak lepas dari kekompakan seluruh OPD pengampu indikator-indikator pada Indeks SPBE. Secara detail kenaikan komponen dapat kami jelaskan bahwa Domain Tata Kelola dari nilai 2,30 menjadi 3,60 kemudian Domain Layanan SPBE dari 3,51 menjadi 4,07.

Kedepannya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan lebih meningkatkan kekompakan dengan OPD pengampu komponen indeks SPBE. Peningkatan sinergitas ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dinas secara khusus dan kinerja Kabupaten Blitar secara umum.

Demikian yang dapat kami sajikan terkait laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kemudian hari langkah-langkah dan usaha peningkatan Indeks SPBE akan terus kami tingkatkan dengan memperbanyak koordinasi dan bahkan jika memungkinkan akan melakukan studi tiru ke kabupaten/kota yang mengalami kenaikan indeks SPBE yang signifikan pula. Besar harapan kami agar pemerintah daerah semakin mendukung dan memberikan perhatian lebih atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR

Herman Widodo, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650916 199112 1 001